

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul “Peran *Save The Children* dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan melalui Yayasan Sayangi Tunas Cilik di Kupang.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pallawaruka (2014), dengan judul “Peran Organisasi *Save The Children* Dalam Penanganan Kasus Pekerja Anak” bertujuan untuk mengetahui strategi organisasi *save the children* dalam penanganan kasus pekerja anak di Indonesia. dan melihat apa saja yang menjadi hambatan yang dialami organisasi *save the children* dalam menangani kasus pekerja anak. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh organisasi *Save the Children* dalam penanganan kasus pekerja anak tersebut adalah dengan membuat EXCEED program (*Eliminate Exploitative Child Labor through Education and Economic*). Sedangkan Hambatan yang dialami oleh organisasi *Save the Children* selama menjalankan program tersebut adalah mitra kerja organisasi *Save the Children* di Pontianak mengalami permasalahan internal sehingga tim peneliti tidak dapat menjalankan kegiatan survey di daerah Pontianak.

Dari penjelasan diatas ada persamaan antara peneliti dengan apa yang diteliti oleh Pallawaruka (2014) yakni sama-sama meneliti tentang bagaimana peran *Save The Children*. Namun yang membedakan disini peneliti mengkaji tentang bagaimana kekerasan terhadap anak sedangkan Pallawaruka (2014) mengkaji tentang kasus

pekerja anak, selain itu tempat penelitiannya juga berbeda. Peneliti akan melakukan penelitian di Kota Kupang sedangkan Pallawaruka melakukan penelitian di Kota Pontianak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lestyoningsih (2019), dengan judul “Penanganan kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat di Indonesia” penelitian dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa artikel yang berhubungan dengan penanganan kekerasan terhadap anak berbasis masyarakat. dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa situasi kekerasan terhadap anak menjadi isu dibalik tingginya angka kematian dan kesakitan anak. penanganan terhadap korban kekerasan terhadap anak di Indonesia telah dilakukan, baik yang dilakukan oleh berbagai institusi entah itu institusi pemerintahan atau lembaga swadaya masyarakat. namun koordinasi lintas sektor ini masih menjadi permasalahan. kesimpulannya adalah penanganan terhadap anak korban dan pelaku kekerasan yang komprehensif melalui penanganan yang menyeluruh dan berbagai pihak yang kompeten.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh Lestyoningsih (2014) bahwa persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang masalah kekerasan terhadap anak. Namun yang membedakan disini adalah peneliti melakukan studi tentang bagaimana peran sebuah lembaga dalam merespon kasus kekerasan terhadap anak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rini (2019), dengan judul “Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu di wilayah hukum kota Bandar Lampung”, kekerasan di Kota Bandar Lampung tiap

tahun mengalami peningkatan sehingga penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mencari solusi dalam upaya penanggulangan melalui sistem perlindungan terpadu dan selain itu untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami dalam upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu. Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui sistem perlindungan terpadu belum berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan anak. *Kedua*, Upaya penanggulangan kekerasan anak yang dilakukan oleh P2TP2A dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dengan cara penyuluhan-penyuluhan, penegakan hukum, dan seriusnya aparat penegak hukum dalam menanggapi terjadinya kekerasan pada anak.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti dengan Rini (2019) bahwa persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang kekerasan terhadap anak. Namun yang membedakan disini adalah peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui peran Yayasan Sayangi Tunas Cilik di Kota Kupang dalam merespon kasus kekerasan terhadap anak.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya memang masih berkaitan dengan judul yang digunakan saat ini . Namun dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada upaya atau peran Save The Children dalam memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan di Kupang. Karena melihat fenomena kekerasan terhadap anak yang sering terjadi di Kota/kabupaten Kupang sehingga membuat ketertarikan pada peneliti dalam melakukan sebuah penelitian untuk

mengetahui peran lembaga Save The Children dan bagaimana memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan di Kupang.

2.2. Konsep Peran

2.2.1. Pengertian Peran

Peran adalah sebuah konsep tentang bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh seorang individu dalam masyarakat dan meliputi berbagai tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Dewi Wulan Sari, 2009: 106).

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subjektif (<http://digilib.unila.ac.id/11913/13/BAB%20II.pdf>). Peran dimaknai dengan tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekelompok orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- 2) Peraturan adalah suatu konsep perihal apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukans seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupannmasyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah sebuah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2.3. Konsep Anak

2.3.1. Pengertian Anak

Pengertian anak dari aspek Psikologi, mengatakan bahwa anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan (Kasiram, 1994:25).

Secara umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak

atau *juvenale* adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum mencapai dewasa serta belum kawin. Dalam pengertian ini sering digunakan untuk mengkaji berbagai bentuk persoalan anak.

Anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak sering ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk berusara dan bahkan merupakan sering menjadi korban tidak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya (R.A Kosnan, 2005: 113).

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para ahli. Namun dari pengertian ini tidak ada kesamaan dalam pengertian anak tersebut, karena dilatar belakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut undang-undang :

1. Anak menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002Ttentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapa nbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang HukumpPerdata, mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu menikah. Jadi anak adalah setiap orang

yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Namun seandainya seorang anak yang telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh pasangannya sebelum umur 21 tahun tetap saja dianggap orang yang sudah dewasa.

3. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (pasal 1 butir 2).

4. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Batasan umur anak memang sangat penting dalam perkara perlindungan terhadap anak, sebab hal inilah yang akan dipergunakan untuk mengetahui siapa yang diduga sebagai pelaku tindakan kejahatan. Berbicara sampai pada batas usia berapa seseorang dikatakan anak, pembatasan anak menurut para ahli sebagai berikut:

Selama ditubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses pertumbuhan dan perkembangannya itu selesai, jadi batasan umur anak-anak adalah sama permulaan menjadi dewasa, yakni 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki, Sugiri dalam Gultom Maidi (2010: 32).

Dari beberapa pengertian diatas bahwa batasan umur anak yang dijelaskan masih bervariasi. Kiranya menjadi sangat penting untuk menentukan dan disepakati sehingga kedepannya tidak terjadi hambatan dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Dalam lingkup hak asasi manusia serta undang-undang tentang perlindungan anak masih ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan dan belum menikah.

2.3.2. Hak Anak

Anak adalah amanah dan sebuah karunia dari tuhan yang maha esa, bahwa setiap manusia terdapat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh. Anak juga di anggap sebagai calon generasi bangsa yang akan menjadi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa ini. Merekalah yang akan mengeksplorasi potensi dalam diri mereka untuk menjaga dan memperjuangkan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Sebagai calon penerus bangsa, setiap anak kelak akan memikul sebuah tanggung jawab, oleh sebab itu mereka juga harus di berikan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam hidup mereka, baik secara fisik, mental maupun sosial. Serta memberikan sebuah perlindungan dan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan untuk terpenuhinya hak tanpa adanya diskriminasi.

Pengertian anak dalam hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia, pengaturannya masih tersebar di dalam berbagai perundang-undangan. Dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan anak sebagaiberikut : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin. Adapun didalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian tentang anak yaitu : “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai salah satu bentuk ketentuan yang di atur secara spesifik dalam mengatur hak-hak anak, dan mencantumkan kriteria anak sesuai pasal 1, yakni anak yang masih ada dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun. Pengaturan dalam undang-undang terhadap pembatasan usai anak dalam hal ini masih bersifat diversifikasiddan pada akhirnya membawa implikasi dalam penerapannya.

Di dalam ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menurut isi dalam undang-undang ini menjelaskan paling tidak ada 19 hak anak sebagai berikut,

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasan dan diskriminasi....
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitasdiri status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingannorangtua.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan di asuh oleh orangtuanya sendiri.
5. Dalam hal karna suatu sebab orang tuanya tidak dapat menajamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak di asuh atau diangkat menjadi anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
7. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan sebuah informasi sesuai dengan kapasitas kecerdasannya dan usianya demi pengembangan potensi dirinya yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya.

13. Setiap anak berhak untuk di asuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : (a) penyalahgunaan dalam politik; (b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan (e) pelibatan dalam peperangan.
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; (b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan (c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pemenuhan hak-hak anak memang pada dasarnya merupakan sebuah tanggung jawabnya orang tua. Sebab orang tua merupakan aktor pertama yang di kenal oleh anak dan orang tua juga mempunyai peran yang sangat vital dalam keluarga dan mempunyai

kewajiban bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya. Pemenuhan hak-hak tersebut, khususnya pada kebutuhan akan perlindungan, yang meliputi dalam bidang kesehatan, pendidikan, agama, dan kesejahteraan sosial. Bantuan dan pelayanan-pelayanan yang di berikan dengan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa harus membedakan jenis kelamin, dalam hal agama, pendirian politik, bahkan sampai pada kedudukan sosial.

2.3.3. Perlindungan Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mendefenisikan bahwa:

Perlindungan anak merupakan serangkaian kegiatan untuk melindungi anak sejak dalam kandungan, agar anak dapat terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta terbebas dari segala bentuk perlakuan diskriminasi dan tindakan kekerasan baik secara fisik, mental, rohani maupun sosial secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Permasalahan anak memang setiap tahun mengalami peningkatan, terkhususnya pada kasus kekerasan terhadap anak. Angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat. Hingga pertengahan Maret 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) telah menerima sekitar 1.900 laporan (Saiful Munir. Sindonews.Com, 19 Maret 2018. <https://nasional.sindonews.com/read/1290932/15/laporan-kekerasan-terhadap-anak-meningkat-di-2018-1521466328>). Tentu hal ini tidak biarkan begitu saja, hal ini menjadi tanggung jawab semua elemen untuk melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu pembahasan terkait dengan perlindungan anak juga sekarang mulai berkembang.

Perlindungan anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sebuah tolak ukur dalam kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan

negara. Untuk itu hal ini merupakan sebuah kewajiban kita bersama bagi pemerintah dan seluruh anggota masyarakat baik secara individu maupun secara kolektif untuk memperjuangkan perlindungan terhadap hak-hak anak sesuai kemampuan yang di miliki demi kepentingan umat dan kemanusiaan. Perlindungan anak juga merupakan sebuah kegiatan bersama yang di lakukan secara sadar bagi setiap orang yang bekerja bertujuan untuk memperjuangkan keamanan, pengadaan, dan untuk memenuhi kesejahteraan rohani dan jasmani anak sesuai dengan kepentingan hak asasinya. Namun melihat krisis dan konflik yang akhir-akhir ini melanda bangsa Indonesia merupakan sebuah tekanan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan kondisi anak-anak dan remaja dapat di golongkan sebagai kelompok yang rawan terjadi keterpurukan. Melihat dari kondisi yang di sekitar lingkungan anak telah menjadi perhatian masyarakat dunia pada umumnya dan juga untuk masyarakat indonesia pada khususnya. Kegagalan pranata sosial dan kondisi ideal yang di perlakukan untuk melindungi hak-hak anak indonesia yang sampai saat ini belum diwujudkan oleh pihak pemerintah republik indonesia.

2.3.4. Perlindungan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Gosita Arif, 2004: 18). Di indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak merupakan salah satu tujuan pembangunan. Hal ini pemerintah berupaya untuk melindungi hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan sebuah tindakan dalam proses pencegahan dan tindakan represif, namun yang paling utama adalah tindakan pencegahan. Dalam upaya pencegahan ini di atur sedemikian rupa untuk menghindar dari hal-hal yang

merugikan kepentingan dan menimbulkan penderitaan secara fisik, mental, dan sosial anak tidak terjadi, sehingga segala bentuk aktifitas anak berada dalam kondisi prima untuk menghadapi masa depannya.

Dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990, konvensi hak anak telah diratifikasi dan berlaku mengikat menjadi hukum Indonesia. Menjadi sebuah negara yang sudah meratifikasi konvensi hak anak, Indonesia berkewajiban untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak melalui Peraturan Perundang-undangan hukum nasional. Dilihat dari segi hukum nasional, saat ini sudah banyak perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum untuk melindungi hak-hak anak, ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang ini dalam pasal 1 menyatakan bahwa :

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”.

Dalam pasal 3 dijelaskan tentang kesejahteraan sosial, yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan keberlanjutan;

Selanjutnya dalam pasal 16 menjelaskan bahwa :

1. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
2. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang pasal 2 ayat 3 dan 4 menjelaskan bahwa :

“anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa ia dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan secara wajar”.

Ketentuan hukum yang di paparkan di atas merupakan sebuah dorongan untuk perlindungan anak dalam hal untuk mengusahakan kesejahteraan anak danmmembrikan perlakuan yang adil terhadap anak. Dari penejelasan ini bahwa masyarakat dan pemerintah harus mengupayakan kesejahteraan anak (pasal 11 ayat 2 Undang-undang No. 4 Tahun 1979). Artinya bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam mengupayakan perlindungan terhadap anak. Setiap anggota masyarakat harus memperjuangkan serta melindungi hak-hak anak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan berbagai betuk upaya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Setiap warga negara ikut serta ikut serta dalam mewujudkan perlindungan anak demi kesejahteraan anak, orang tua, dan bangsa. Kenapa demikian sebab kesejahteraan anak sangat berpengaruh positif pada orang lain, seperti orangtua, masyarakat, dan negara.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang telah mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia termasuk dengan hak-hak asi anak. Yang di maksud anak dalam undang-

undang adalah, setiap manusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Yang di maksud dengan hak asasi manusia adalah :

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam bagian ke sepuluh bahwa isi undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak anak sebagai berikut.

1. Hak anak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. (pasal 52 (1))
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. (pasal 52 (2))
3. Hak anak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, sejak dalam kandungan. (pasal 53 (1))
4. Hak anak atas suatu nama dan status kewarganegaraan sejak kelahirannya. (pasal 53 (2)).
5. Hak atas setiap anak cacat fisik dan atau mental untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsa dan bernegara. (pasal 54).

6. Hak anak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dan dididik, di arahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua atau walinya sampai dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 57 (1)).
7. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. (pasal 58 (1)).
8. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. (pasal 60 (1)).
9. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan diri sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. (pasal 64).
10. Hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. (pasal 65).
11. Hak anak bahwa setiap anak di rumpun kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. (pasal 66 (5)).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang ini di buat untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak. Dari penjelasan dalam undang-undang ini bahwa yang di maksud anak adalah, seseorang yang belim berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 T entang Pelindungan Anak dalam bab III yang mengatur hak dan kewajiban anak, bahwa :

1. Hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan, kekerasan dan diskrimnasi. (pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2002)
2. Hak anak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (pasal 5 undang-undang nomort 23 tahun 2002)
3. Hak anak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (pasal 6)
4. Hak anak untuk mengetahui orangt uanya, dibesrkan dan diasuh oleh orang tuanya. (pasal 7aayat (1)).
5. Hak anak untuk diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak yang di angkat oleh orang lain apabila dalam hal karena sesuatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 7aayat (2))
6. Hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (pasal 8)

7. Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (pasal 9 aat (1))

Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak selain mengatur hak-hak anak seperti yang di jelaskan diatas bahwa masih ada juga dalam pasal 59 mengatur tentang anak yang mendapat perlindungan khususs, yaitu di berikan kepada :

1. Anak yang tereksplotasi secara ekonomi atau seksual
2. Anak yang diperdagangkan.
3. Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik secar fisik dan/atau secara mental.
4. Anak korban perlakuan salah.
5. Penelantaran.

2.3.5. Kesejahteraan Anak

Di dalam kehidupan bermasyarakat anak mempunyai kedudukan yang sangat penting, sebab anak adalah tunas harapan bangsa yang tumbuh dan kembang menjadi sebuah harapan dalam meneruskan dan memperjuangkan cita-cita bangsa. Sebagai generasi yang nantinya akan mempertahankan dan memperjuangkan bangsa ini perlu untuk dirawat, dilindungi, dibina serta meningkatkan kesjahteraannya. Hal ini yang akan menunjang tumbuh dan kembangan dalam membentuk kepribadian dan keterampilannya serta kemampuan dalam mengambil sebuah peran dang fungsi dalam kehidupannya. Artinya bahwa segala bentuk pencapaian anak di kemudian hari

tergantung bagaimana pemerintah memberikan perlindungan serta jaminan dalam hidup terhadap anak.

Memang secara fisik dan kejiwaan serta dengan sosial, anak-anak memang masih dalam tahap perkembangan, akan tetapi sebagai manusia mereka yang mempunyai hak dan kebutuhan sesuai dengan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan sosialnya.

Namun sebelum kita merujuk pada pembahasan terkait dengan kesejahteraan anak. Perlu terlebih dahulu kita pahami mengenai pengertian kesejahteraan sosial.

Menurut friendlander (1991) kesejahteraan sosial :

Social welfare is the organized system of social services and institution, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationship which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and community.

(kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial, yang dirancang untuk membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan dan hubungan individu dan sosial memungkinkan mereka untuk mengembangkan seluruh kapasitas dan memajukan kesejahteraan mereka dalam kesinambungan dengan kebutuhan akan keluarga dan lingkungan mereka).

Kemudian dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. dalam pasal 1 ayat 1 ;

“Kesejahteraan sosial ialah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri ,sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Artinya bahwa melihat pengertian di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial memiliki pengertian yang luas, tentu hal ini meliputi sebuah keadaan yang baik dan sehat atau sejahtera dan kepentingan manusia secara garis besar termasuk

kebutuhan fisik, mental, perasaan, spiritual dan ekonomi. Selain itu kesejahteraan sosial juga mencakup berbagai lembaga-lembaga utama, kebijaksanaan, program dan proses-proses yang berhubungan dengan penanggulangan dan pencegahan dalam masalah sosial, serta perkembangan sumber-sumber manusia dan peningkatan taraf hidup.

Kesejahteraan sosial dapat diukur dalam tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*), dan pembangunan manusia (Sen, 2008). Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan yang memberikan jaminan terhadap tumbuh dan kembangnya seorang anak dengan sewajarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya. Berbicara kesejahteraan anak adalah sebuah hak asasi anak yang harus diperjuangkan bersama. Untuk itu mulai dari pelaksanaan pengadaan kesejahteraan melihat dari keterlibatan masyarakat dalam usaha pengadaan perlindungan anak. Dengan ada perlindungan terhadap anak tentu pemerintah harus bergandeng tangan dengan masyarakat untuk pengadaan perlindungan anak. Sebab negara kita saat ini sangat rentan sekali dengan kasus kekerasan terhadap anak.

Anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan tentu memiliki hambatan dalam tumbuh dan kembang secara wajar. Hal ini tentu akan berpengaruh pada segala bentuk aktivitas mereka. Untuk itu anak-anak yang mengalami masalah kesejahteraan perlu untuk memberikan pelayanan dan bimbingan untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam kehidupannya sesuai dengan harapan masyarakat. Begitupula anak korban kekerasan dalam rumah tangga bahwa mereka yang mengalami masalah kesejahteraan tentu mereka juga membutuhkan perhatian dan bimbingan serta hak

untuk mendapatkan kasih sayang dari orangtua dan perlindungan seperti anak-anak lainnya.

Kesejahteraan anak (*Child Welfare*), seperti kesejahteraan sosial, merupakan konsep yang cukup luas dan bisa didefinisikan dalam arti yang lebih luas, sebagaimana yang di kemukakan oleh Jhonson & Schwartz (1991: 167) mendefinisikan sebagai : *series of activities and programs through which society expresses its special concern for children and willingness to assume responsibility for some children until they are able to care for themselves.* (bagian dari kegiatan dan program yang mana melalui pernyataan masyarakat itu sebagai perhatian khusus untuk anak-anak dan kesejahteraannya untuk mengambil pertanggungjawaban untuk beberapa anak sampai mereka mampu untuk mandiri) (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123838-SK%20006%2009%20Kha%20u%20-%20Upaya-Upaya-Literatur.pdf>) (diakses 10 desember 2018).

Berkaitan dengan pengertian di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan anak merupakan sebuah bidang khusus yang diambil oleh para profesi kesejahteraan sosial. Berkenaan dengan masalah-masalah kesejahteraan anak, memang hal ini berkaitan dengan peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak sebagai akibat dari kemiskinan dan adanya interaksi yang kurang memadai dalam lingkungan keluarga, tentu sangat diperlukan perlindungan terhadap anak untuk membantu dalam upaya mensejahterakan anak.

Dalam bagian ini, akan dijelaskan bahwa kesejahteraan anak di Indonesia dijamin oleh Undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

kesejahteraan anak. Pada dasarnya perlindungan anak merupakan bagian dari kesejahteraan anak, sedangkan kesejahteraan anak seperti dijelaskan sebelumnya merupakan aspek kesejahteraan sosial, sehingga dalam aspek perlindungan anak juga termasuk bagian dalam aspek kesejahteraan sosial.

2.4. Konsep Kekerasan Anak

2.4.1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan menurut WHO adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan yang dilakukan dengan sengaja, dari ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan dalam proses perkembangan atau perampasan hak. *Abuse* adalah kata yang biasanya diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, dan perlakuan salah.

Dalam *The Social Work Dictionary*, Barker (1987: 1) dalam Huraerah (2006:36).

Kekerasan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan cedera atau bahkan menyebabkan kematian atau menyebabkan kerusakan fisik pada barang orang lain.

Saraswati mengungkapkan bahwa kekerasan adalah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik dilakukan oleh seseorang atau kelompok, yang dapat menimbulkan penderitaan pada pihak lain. kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan luka atau bahkan sampai kematian, dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban melainkan berakibat pada timbulnya trauma yang berkepanjangan pada diri korban (Malinda, 2008).

Tindakan kekerasan dapat dibagi menjadi dua (Andayani, 2001), yaitu :

1) Kekerasan terjadi di lingkungan sosial

Anak sering mengalami kekerasan dalam lingkungan sosial kekerasan yang dialami seperti penganiayaan atau *child abuse*, yaitu perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya yang dianggap tidak wajar. Defenisi tentang *child abuse* biasanya ditentukan oleh empat faktor, yaitu *pertama* intensitas perilaku atau tindakan, *kedua* efek yang ditimbulkan pada diri anak, *ketiga* penilaian terhadap perilaku atau tindakan tersebut, *keempat* standar diaman penilaian itu dilakukan. Dalam masyarakat orang-orang beranggapan bahwa penganiayaan itu terjadi akibat ketidakpuasan pelaku terhadap si korban. Walau demikian tidak ada atauran yang memperbolehkan perilaku atau tindakan yang mengakibatkan luka atau trauma pada orang lain.

2) Kekerasan yang dialami dalam lingkungan keluarga (*domestic violence*)

Kekerasan yang dialami dalam keluarga biasanya kekerasan yang diterima seorang anak dari orangtuanya, baik berupa fisik, maupun mental. Biasanya kekerasan dalam keluarga muncul karena adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Dari berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau sewenang-wenang, hal tersebut disertai dengan ancaman-ancaman sehingga menimbulkan penderitaan pada orang lain (korban) baik secara fisik maupun secara mental dan hal tersebut memberikan dampak buruk pada orang lain.

2.4.2. Kekerasan Terhadap Anak

Anak sebagai generasi penerus bangsa, tentunya harus mendapatkan hak-hak dan kebutuhannya secara memadai. Begitupula sebaliknya mereka bukan sebagai objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau dari pihak manapun. Anak yang dinilai rentan mendapat kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan baik agar pertumbuhan dan perkembangan mereka secara sehat dan wajar. Hal ini sangat perlu dilakukan, agar kelak mereka menjadi generasi yang cemerlang.

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentifikasi dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga memberikan dampak yang buruk dan permanen terhadap anak (korban). Oleh sebabnya, istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang dari yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*); dari yang bermatra psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural (Huraerah. 2006:14).

Child abuse yaitu “*the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child’s care*” (kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan oleh para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak) Barker (1987: 23) dalam Huraerah (2006: 36).

Selain itu dalam Encyclopedia article from encarta, mengartikan bahwa *child abuse* sebagai “*intentional acst that result in physcal or emotional harm to childre. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at at a child’s basic need’s*” (kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menumbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional (Richar J. Gelles (2004: 1) dalam Huraerah (2006: 36)).

Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan salah satu tindakan abnormal dalam masyarakat sebab hal ini terjadi karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. saat ini kondisi dari gejala-gejala abnormal sudah semakin berkembang dalam permukaan, seperti terjadinya kasus penelantaran, penganiayaan, dan lain-lain..

2.4.3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Terry E. Lawson, Psikiater anak, sebagaimana dikutip Rakhmat dalam baihaqi (1999: 25) dalam Huraerah (2006: 36-37) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*Child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu; *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Namun ada penjelasan lain dari, Suharto (1997: 365-366) dalam Huraerah (2006: 37-38) mengelompokan *chil abuse* menjadi; *physical abuse* (kekerasan fisik), *psychological abuse* (kekerasan psikologis), (kekerasan seksual), dan *social abuse* (kekrasan sosial). Dari keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebgai berikut :

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah sebuah kekerasan seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan

benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau pun sampai pada kematian. Bentuk luka yang terjadi pada anak seperti lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan yang dilakukan dengan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, rotan, dan lain-lain. Selain itu ada pula berbentuk luka bakar akibat tersiram bensin atau sundutan rokok atau setrika. Kekerasan fisik pada anak sering kali terjadi di daerah paha, lengan, mulut, dada, pipi, punggung atau daerah bokong. Timbulnya kekerasan terhadap anak secara fisik pada umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai oleh orang tuanya. Seperti anak nakal, sering menangis, merusak barang berharga, dan lain-lain.

2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan gambar atau mempertontonkan video pornografi pada anak. Anak yang sering mendapatkan perlakuan seperti ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, mennggis ketika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
3. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksplotasi seksual).
4. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan yang di tunjukan oleh orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga,

tidak diberi pendidikan dan kesehatan yang layak. Sedangkan eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau sebuah perlakuan yang sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau bahkan lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti memaksakan anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak sesuai dengan perlindungan terhadap proses perkembangan anak secara fisik, psikis, dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di tempat pabrik yang membahayakan dengan upah yang rendah tanpa alat-alat keselamatan yang kurang memadai, atau anak dipaksa untuk bekerja yang melampaui batas kemampuannya.

2.5. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari beberapa faktor-faktor: personal, sosial, dan kultural. Dari beberapa faktor tersebut dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu; (1) pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*), (2) stres sosial (*social stress*), (3) isolasi sosial dan partisipasi dari masyarakat bawah (*social isolation and low community involvement*), dan (4) struktur keluarga (*family structure*) (Huraerah, 2006: 42-43).

Mengenai keempat faktor kekerasan yang dilakukan terhadap anak dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Pewarisan kekerasan antar generasi (*intergenerational transmission of violence*)

Banyak anak yang belajar perilaku kekerasan dari orangtuanya dan ketika tumbuh menjadi seorang dewasa mereka melakukan tindakan yang kekerasan

terhadap anaknya. Dengan demikian bahwa perilaku kekerasan menjadi sebuah warisan dari generasi ke generasi.

2. Stres sosial (*social stress*)

Stress yang ditimbulkan dari berbagai kondisi sosial meningkatkan kondisi sosial kekerasan terhadap anak dalam sebuah keluarga. Kondisi sosial ini mencakup; pengangguran (*unemployment*), penyakit (*illnes*), kondisi perumahan buruk (*poor housing conditions*), ukuran keluarga besar dari rata-rata (*a larger-than-average family size*), kelahiran bayi baru (*the presence of a new baby*), orang berkebutuhan khusus (*disabled person*) dirumah dan kematian (*death*) seorang anggota keluarga.

3. Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah (*social isolation and low community invovelment*)

Orangtua dan pengganti orangtua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, mereka cenderung terisolasi secara sosial. hal tersebut menunjukan bahwa sedikit sekali orang tua yang melakukan tindakan keras, kurang terlibat dalam sebuah organisasi masyarakat dan kebanyakan orang tua kurang memiliki hubungan dengan teman atau kerabat.

Kurangnya keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan, sehingga pentingnya dalam melibatkan diri dalam organisasi masyarakat untuk mendapat dukungan dan dapat menghilangkan stres keluarga dan sosial. Selain itu kurangnya kontak dengan masyarakat menjadikan para orang tua kurang memungkinkan untuk merubah perilaku mereka sesuai dengan nilai-nilai dan standar-standar masyarakat.

4. Struktur keluarga (*family structure*)

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian terhadap anak. Misalnya, orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua utuh. Karena dengan orang tua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan dengan keluarga lainnya, sehingga dari permasalahan tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak.

Keluarga-keluarga yang sering bertengkar secara kronis atau istri yang diperlakukan salah memiliki tingkat dalam melakukan tindakan kekerasan lebih tinggi terhadap anak. Selain itu, keluarga-keluarga yang di dalam rumah entah suami atau istri yang mendominasi dalam membuat keputusan penting seperti; dimana bertempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, ketika mempunyai anak, dan berapa banyak uang yang harus dibelanjakan untuk makan dan penginapan mempunyai tingkat kekerasan terhadap anak lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang didalam rumahnya entah suami atau istrinya sama-sama bertanggungjawab dalam menjalani hidup.

2.6. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Konsekuensi dari tindakan kekerasan dan penelantaran terhadap anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang luas (*far-reaching*). Luka-luka fisik, seperti; memar-memar (*bruises*), goresan-goresan (*scrapes*), dan luka bakar (*burns*), hingga kerusakan otak (*brain damage*), cacat permanen (*permanent disabilities*), dan kematian (*death*). Selain itu efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa sampai seumur hidup, seperti; rendah harga diri, (*Lowered sense of self-worth*), ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebayanya (*an inability to relate to*

peers), masa perhatian tereduksi (*reduced attention span*), dan gangguan belajar (*learning disorders*), kecemasan secara berlebihan (*excessive Eanxiety*) atau gangguan identitas disosiatif (*dissociative identity disorder*) dan bertambah resiko bunuh diri (*suicide*) richard j.gelles (2004: 6-7) dalam huraerah (2006: 46).

Dari uraian diatas terlihat bahwa dampak kekerasan yang terjadi pada anak sangat mengenaskan. Sayang sekali masyarakat pada umumnya tidak menyadari bahwa dampak dari kasus kekerasan yang di lakukan terhadap anak bisa memberikan dampak yang sangat luas. Hal ini mungkin banyak orang yang belum memahami dan menyadari bahwa pemukulan yang bersifat fisik terhadap anak memiliki dampak yang sangat besar seperti kerusakan emosional anak.

2.7. Peran Pekerja Sosial

Dalam sistem Pelayanan sosial, seorang pekerja sosial memiliki peran yang sangat sentral dalam memberikan pelayanan. sebagai sebuah profesi kemanusiaan, *social worker* memiliki seperangkat ilmu pengetahuan (*Body Of Knowledge*), keterampilan (*Body Of Skills*), dan nilai (*Body Of Velues*) yang dimilikinya melalui pendidikannya atau penagalaman profesional. dari ketiga poin tersebut akan membentuk pendekatan dengan ilmu dan pengalaman sebagai pekerja sosial akan membantu kliennya.

Menurut Parsons, dkk (dalam Suharto, 2005: 97), peran pekerja sosial adalah sebagai berikut :

1. Sebagai Fasilitator

Berdasarkan literatur pekerja sosial, peran fasilitator sering disebut sebagai pemungkin (*enabler*). menurut Barker (dalam suharto, 2005:098) mengatakan bahwa peranan sebagai fasilitator sebagai tanggung jawab untuk membantu klien menjadi mampu menangani tekanan situasional atau transisional.

Fasilitator adalah yaitu orang yang mampu mempermudah dan meringankan jalan partisipan (Wibhawa, 2010: 105). dalam hal ini fasilitator bertujuan untuk membantu klien menjadi mampu untuk mengatasi tekanan situasional maupun dari tekanan transisional dengan cara memberikan atau menyediakan kesempatan dan fasilitas untuk klien yang membutuhkan dalam mengatasi masalahnya, serta untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi yang dimiliki klien.

2. Sebagai Perantara (*Broker*)

Sebagai perantara adalah untuk membuka sebuah ruang terhadap individu, kelompok, dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini adalah dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan sosial kepada individu, kelompok, dan masyarakat. Dalam proses pendampingan, peran sebagai perantara ada tiga prinsip utama dalam melakukan peranan sebagai broker yaitu ; (a) mampu mengidentifikasi dan memetakan sumber-sumber kemasyarakatan sesuai dengan potensinya; (b) mampu menghubungkan konsumen atau klien dengan sumber secara konsisten; (c) mampu mengevaluasi efektivitas sumber dalam kaitannya dengan kebutuhan penerima manfaat.

3. Sebagai Mediator

Peran sebagai mediasi adalah mampu memberikan layanan mediasi jika klien mengalami konflik dengan pihak lain atau orang lain agar dicapai sebuah kesepakatan antara tujuan dan kesejahteraan antara kedua belah pihak.

Beberapa teknik dan keterampilan yang dapat digunakan dalam melakukan peran mediator, yaitu; (a) membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mengidentifikasi sebuah kepentingan bersama, (b) mencari persamaan nilai dari berbagai pihak yang terlibat dalam konflik, dan (c) memfasilitasi komunikasi dengan cara mendukung mereka agar mampu berbicara satu sama lain, galaway (dalam Suharto, 2010: 101).

4. Sebagai Pembela (*advocate*)

Peran sebagai pembela dalam praktek pekerja sosial, dalam masyarakat tidak terlepas dari situasi politik sebagai seorang pekerja sosial harus berhadapan dengan sistem politik dalam rangka untuk menjamin kebutuhan\serta sumber yang diperlukan oleh masyarakat atau dalam melaksanakan tujuan pengembangan masyarakat. Andaiakan pelayanan dan sumber sulit untuk dijangkau oleh masyarakat, disitulah pekerja sosial hadir sebagai pembela.

5. Sebagai Pelindung (*Protector*)

Seorang pekerja sosial dalam melakukan peran sebagai pelindung (*Guardian role*), pekerja sosial bergerak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan korban, calon korban, serta populasi yang beresiko lainnya. Peranan sebagai pelindung mencakup penerapan berbagai kemampuan yang menyangkut: (a) kekuasaan, (b) pengaruh, (c) otoritas, dan (d) pengawasan sosial. Peran sebagai pelindung meliputi : a) menentukan siapa klien yang paling utama; b) menjamin bahwa

tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan alur proses perlindungan; dan c) berkomunikasi dengan berbagai pihak yang terpengaruh oleh tindakan sesuai dengan tanggungjawab etis, legal, dan rasional praktek pekerja sosial.

Pekerja sosial merupakan suatu strategi yang sangat menentukan keberhasilan sebuah program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip sebagai pekerja sosial, yakni membantu orang agar mampu memulihkan dirinya sendiri. Selain itu peranan sebagai seorang pekerja sosial sebagai agen perubahan yang turut membantu dan memecahkan sebuah masalah yang dialami penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti lansia dan lainnya.

